



Integrated Reporting: Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia

Febriansyah

Department of Management, Faculty of Economic and Business,
Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo Pagar Alam

Email: febriansyah@lembahdempo.ac.id

How to Cite :

Febriansyah. (2021) *Integrated Reporting: Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia* *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>

ARTICLE HISTORY

Received [2 Desember 2021]

Revised [23 Desember 2021]

Accepted [12 Januari 2022]

KEYWORDS

*Integrated Reporting,
Stakeholder Engagement,
Corporate Governance.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menguji secara empiris pengaruh *stakeholder engagement* (yang diproyeksikan dengan konsentrasi kepemilikan, *leverage*, dan kompensasi karyawan) serta dewan komisaris independen dan *gender diversity* sebagai proyeksi dari *corporate governance* terhadap penyajian *Integrated Reporting* pada perusahaan publik di Indonesia dalam Grup Perusahaan LQ 45, ada 22 perusahaan yang masuk dalam sampel penelitian sesuai dengan criteria penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah Data Panel. Analisis datanya Generalized Least Square (GLS) menggunakan E-Views sebagai alat analisisnya. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai analisis pengaruh *stakeholder engagement* dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *integrated report* perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2017-2019, maka diperoleh hasil empiris di mana konsentrasi kepemilikan, *leverage*, proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat komite audit dan *gender diversity* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *integrated report*. Hubungan signifikan positif dengan pengungkapan <IR> adalah variabel kompensasi karyawan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to empirically test the effect stakeholder engagement which is projected with the concentration of ownership, leverage, and employee compensation as well as the independent board of commissioners and gender diversity as projections from corporate governance to the presentation of Integrated Reporting in public companies in Indonesia in the LQ 45 Group of Companies, there are 22 companies included in the research sample in accordance with the criteria of this study. The type of data used is Panel Data, data analysis uses E-Views as an analysis tool. Based on the results of analysis and testing regarding the analysis of the influence of Stakeholder Engagement and Corporate Governance mechanisms on the disclosure of the integrated report of LQ-45 companies listed on the IDX for the 2017-2019 period, empirical results are obtained in which concentration of ownership, leverage, proportion of independent board of commissioners, number of committee meetings audit and gender diversity do not have an influence on the integrated report disclosure. The positive significant relationship with the disclosure of <IR> is the employee compensation variable.

PENDAHULUAN

Pelaporan perusahaan (*corporate reporting*) adalah tanggung jawab organisasi untuk menunjukkan dampak dari keputusan dan kegiatan organisasi pada masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan yang transparan dan perilaku etis (Jonikas, 2014). Tanggung jawab organisasi bukan saja merespon efek negatif yang berdampak pada lingkungan organisasi, namun juga mengevaluasi secara lebih luas dampaknya bagi ekonomi dan sosial. Tiga aspek keberlanjutan – *sustainability*, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, dijabarkan mejadi pendekatan keberlanjutan perusahaan – *corporate sustainability approach* (Jonikas, 2014). Keberlanjutan perusahaan dijadikan sebagai tujuan akhir bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Adopsi pelaporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*– SR) dilihat sebagai salah satu inisiatif bisnis yang dapat digunakan dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, SR memiliki kelemahan di mana SR terpisah dari laporan keuangan organisasi dan gagal menciptakan hubungan antara isu-isu keberlanjutan dengan startegi organisasi (Sirakaya-turk et al., 2015). Kelemahan inilah yang kemudian memunculkan pendekatan pelaporan baru, yaitu pelaporan terintegrasi (*Integrated Reporting* – <IR>).

Integrated Reporting suatu laporan tunggal yang menggabungkan elemen penting dari informasi yang sekarang dilaporkan secara terpisah (keuangan, pendapat manajemen, *governance* dan remunerasi serta *sustainability*) secara komprehensif dan yang lebih penting bisa menunjukkan hubungan diantara semua elemen tersebut dan menjelaskan bagaimana elemen tersebut bisa mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai dalam jangka pendek, menengah dan panjang (International Integrated Reporting Council (IIRC), 2013). Konsep inti dari *integrated reporting* adalah menyediakan satu laporan yang sepenuhnya mengintegrasikan informasi keuangan perusahaan dan non keuangan seperti masalah *environmental, governance, social issues* ((PwC), 2013).

Dalam mempersiapkan *integrated report*, ekspektasi-ekspektasi dan keinginan-keinginan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bagian dari pembentukan lingkup, batasan, dan aplikasi dari *integrated report* (Deloitte, 2014). Oleh karena itu, beberapa pedoman (*guideline*) internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI), Institute of Social and Ethical Accountability, dan International Integrated Reporting Council menempatkan ikatan para pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) sebagai faktor utama dalam pembentukan struktur *integrated reporting* ((ACCA), 2015).

Stakeholder engagement menjadi sangat kritikal bagi *integrated reporting* karena *stakeholder engagement* dapat memfasilitasi pengidentifikasian dan pengertian dari isu-isu dalam <IR> yang mana pada umumnya mencakup isu-isu, kepedulian, kebutuhan, dan ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari atau kerugian oleh, dan yang hak-haknya dilanggar atau dihargai oleh, tindakan korporasi (Freeman, 1984). Yang termasuk *stakeholder* adalah para pemegang saham itu sendiri, para kreditor, pekerja atau buruh, para pelanggan, pemasok, dan masyarakat atau komunitas pada umumnya.

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi akan membuat pemegang saham tersebut semakin kuat posisinya di dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Darus et al., 2013) serta (Godos-Díez et al., 2014) menunjukkan hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan tanggung jawab perusahaan, sedangkan penelitian lain oleh (Lourenço & Castelo, 2013) menunjukkan tidak terdapat hubungan antara konsentrasi kepemilikan *shareholder* dengan terhadap tanggung jawab perusahaan.

Leverage merupakan kapabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (Hornngren et al., 2012). *Leverage*, dalam penelitian ini, digunakan untuk mewakili pihak kreditur sebagai mitra bisnis perusahaan. Para *stakeholder* akan percaya kepada perusahaan yang mengungkapkan laba yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena laporan laba yang tinggi menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang kuat, sehingga perusahaan akan mendapatkan

pinjaman dari para *stakeholdernya*. Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan negatif antara *leverage* dengan tingkat pengungkapan perusahaan (Uyar et al., 2013), yang artinya *leverage* perusahaan yang tinggi akan mengurangi tingkat pengungkapan dalam laporan perusahaan.

Keberadaan karyawan dalam suatu bisnis merupakan mitra untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tidak hanya dalam mendapatkan laba (*profit*) namun juga dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama (*people*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Keterikatan karyawan dengan perusahaan, yang dikenal dengan istilah *employee engagement*, telah menjadi hal yang diperhatikan oleh perusahaan (Valasquez, 2014). *Employee engagement* telah diklaim dapat memprediksikan peningkatan produktivitas pada karyawan, profitabilitas, mempertahankan karyawan, kepuasan konsumen serta keberhasilan untuk organisasi (Kusmalinda, 2015). Tingkat *employee engagement* dipengaruhi berbagai motivasi. Salah satu motivasi tersebut adalah pemberian kompensasi (peningkatan gaji, tunjangan, maupun pembayaran tambahan lainnya). Survei yang dilakukan oleh (Deloitte, 2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *employee engagement* dengan performa perusahaan. Performa perusahaan berhubungan dengan keputusan perusahaan dalam pengungkapan laporan perusahaan (Speziale & Kloviené, 2014).

Corporate Governance (CG) adalah proses dan struktur di mana bisnis perusahaan dikelola oleh manajemen untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Perusahaan dengan penerapan *corporate governance* yang baik diduga memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan pengungkapan informasi lebih luas secara sukarela sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholders* (Khan et al., 2013).

Corporate Governance bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders*. Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan CG harus didukung dengan struktur *corporate governance* terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *good governance* seperti sekretaris perusahaan, komite audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan CG. Penelitian ini menggunakan variabel proporsi dewan Komisaris independen, jumlah rapat komite audit dan *gender diversity* sebagai proyeksi *corporate governance*.

Proporsi dewan komisaris independen digunakan berdasarkan dugaan bahwa keberadaan komisaris independen akan dapat melakukan kontrol dan monitoring terhadap aktivitas perusahaan. Komite audit digunakan karena dianggap sebagai bagian penting dan berpengaruh dalam *corporate governance* untuk membantu dewan komisaris mengatur perusahaan terutama dalam pelaporan keuangan (Li et al., 2012).

Salah satu isu yang berkaitan dengan *corporate governance* adalah komposisi dewan. Keberagaman (*diversity*) dewan menjadi semakin beragam dari segi usia, etnis dan jenis kelamin (*gender*), selain itu keragaman lainnya meliputi masa jabatan, pengalaman, pendidikan dan status sosial ekonomi (Delis et al., 2016). Adanya persebaran dalam anggota dewan dipercaya dapat mempengaruhi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Kumar & Zattoni, 2016). Penggunaan *gender diversity* didasarkan dari penelitian yang telah ada, antara lain penelitian yang dilakukan (Fernandez-Feijoo et al., 2012). Hasil penelitian menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam dewan komisaris dan direksi berpengaruh pada pola pelaporan. (Upadhyay & Zeng, 2014) menemukan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh signifikan pada *voluntary disclosure* perusahaan.

Berbagai penelitian serta literatur yang berkaitan dengan fenomena *integrated reporting* masih terpusat pada negara-negara Anglo-Amerika dan cenderung bersifat kualitatif, di antaranya penelitian yang dilakukan (Dragu & Tiron-tudor, 2013) yang meneliti penggunaan teori kelembagaan (*institutional theory*) dalam proses pengadopsian <IR> secara sukarela (*voluntary*) serta penelitian (Sirakaya-turk et al., 2015) yang menggunakan *Small and Medium-Sized Enterprises* (SME) di Turki sebagai objek penelitian untuk meneliti pengaplikasian <IR> di negara tersebut.

Pengungkapan <IR> di kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*, artinya tidak ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan *financial reporting* (Suryono & Prastiwi, 2011). Di Indonesia, studi mengenai <IR> masih sangat jarang. Hal ini dikarenakan sangat terbatasnya sampel, yaitu perusahaan yang melakukan praktik pengungkapan <IR>.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Ahmed Haji & Anifowose, 2016b) yang meneliti mengenai pengaruh komite audit terhadap pengungkapan <IR>. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh komite audit terhadap pengungkapan <IR> dengan memodifikasi variable penelitian. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan variabel independen lain, yaitu *stakeholder engagement* (yang diproyeksikan dengan konsentrasi kepemilikan, *leverage*, dan kompensasi karyawan) serta dewan komisaris independen dan *gender diversity* sebagai proyeksi dari *corporate governance*. Penulis menambahkan variabel *stakeholder engagement* dan proyeksi variabel *corporate governance* karena perkembangan <IR> akan mempengaruhi para *stakeholder* maupun perusahaan itu sendiri dan <IR> juga merupakan topik yang potensial bagi para peneliti di masa yang akan datang (Cheng et al., 2014).

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 periode 2017-2019. Pemilihan indeks LQ-45 ini sejalan dengan persyaratan dari IIRC bahwa perusahaan besar lebih ditujukan dalam implementasi <IR> (International Integrated Reporting Council (IIRC), 2013).

LANDASAN TEORI

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang keberadaan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan kontribusi bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. *Stakeholder* yang sangat kuat menyebabkan semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Freeman, 1984; Kokemuller, 2017; Rensburg & Botha, 2014)

Teori Feminisme Liberal

Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan *gender* diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan masalah gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Teori yang dapat dipakai dalam menjelaskan *gender* dalam dunia bisnis salah satunya adalah teori feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan salah satu jenis feminisme yang lahir akibat pemikiran politik. Humm (1992) menyatakan bahwa feminisme liberal adalah gerakan yang tercermin dalam setiap perjuangan yang dilakukan oleh perempuan untuk menuntut hak kebebasan mereka. Teori ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia pribadi dan umum. Setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, terutama pada perempuan (Humm, 1992).

Tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang (Tong, 2009). Feminisme liberal berpandangan bahwa kaum perempuan harus mempersiapkan dirinya untuk dapat mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki dengan cara mengambil berbagai kesempatan yang menguntungkan serta mengenyam pendidikan, mengingat bahwa perempuan adalah makhluk yang rasional dan bisa berpikir seperti laki-laki. (Tong, 2009) juga menambahkan bahwa untuk mencapai kesetaraan itu sendiri, seorang wanita harus mampu mengubah sistem, struktur, dan sikap penindasan yang ada.

Kaum feminis liberal berpendapat selain pendidikan, wanita juga harus mendapatkan kesempatan ekonomi yang sama dengan pria. Kesempatan ekonomi yang dimaksud yaitu dengan memiliki pekerjaan, sehingga wanita dapat memenuhi atau membiayai kebutuhan hidupnya sendiri

dari penghasilan yang ia kerjakan. Jika sudah tercapai, maka wanita dapat disetarakan, tidak akan diremehkan, dan dapat bersaing dengan kaum pria dalam dunia kerja.

Perusahaan yang secara setara memperlakukan pria dan wanita dalam dunia kerja memiliki nilai ekonomi di mana akan mendorong kesuksesan perusahaan dan perkembangan sosial secara bersamaan (World Bank, 2014). Perusahaan dengan performa yang baik akan memicu perusahaan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan keberlanjutan (*sustainable*) perusahaan dan pengungkapan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh (Frias-Aceituno et al., 2013) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara *gender diversity* dengan *integrated corporate social reporting*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh *stakeholder engagement* (yang diproyeksikan dengan konsentrasi kepemilikan, *leverage*, dan kompensasi karyawan) dan *corporate governance* (yang diproyeksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat komite audit dan *gender diversity*) terhadap pengungkapan *integrated report* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun pengamatan penelitian selama 3 (tiga) tahun, yaitu selama periode 2017-2019.

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*), yaitu:

1. Perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2017 sampai 2019 secara terus menerus (tidak pernah mengalami *delisting*) dan secara konsisten tergabung dalam perusahaan indeks LQ-45
2. Perusahaan telah mempublikasikan *annual report* periode 2017-2019

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel sebagai berikut:

$$IRS_{it} = \alpha + \beta_1 KKPM_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 KOMKA_{it} + \beta_4 PDKI_{it} + \beta_5 RKOM_{it} + \beta_6 GEND_{it} + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Hasil Uji Hipotesis

o	Hipotesis	Hasil Penelitian
1 -H1:	Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>integrated report</i> .	Konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>Integrated Report</i> .
2 -H2:	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>integrated report</i> .	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Integrated Report</i> .
3 -H3:	Kompensasi karyawan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>integrated report</i>	Kompensasi karyawan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Integrated Report</i> .
4 -H4:	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>integrated report</i> .	Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Integrated Report</i> .
5 -H5:	Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>integrated report</i> .	Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Integrated Report</i> .
6 -H6:	<i>Gender diversity</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>integrated report</i> .	<i>Gender Diversity</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Integrated Report</i> .

Sumber: data diolah

Tabel 2. Nilai Probabilitas

Variabel	T-Statistik	Probabilitas
IRS	-1.212074	0.2291
KKPM	-0.883940	0.3794
LEV	-1.108304	0.2711
KOMKA	3.186481	0.0021
PDKI	1.949845	0.0547
RKOM	0.350325	0.7270
GEND	1.240438	0.2184

Sumber: data diolah

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan *Integrated Report*

Berdasarkan uji t pada Tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.3794, di mana $\alpha=0.05$, yang artinya variabel ini tidak berpengaruh terhadap <IR>, selain itu koefisien regresi bernilai -0.883940 yang menunjukkan arah hubungan negatif, berbeda dengan teori yang dihipotesiskan. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini ditolak. Sehingga Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darus et al., 2013; Godos-Díez et al., 2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *integrated report*. Arah koefisien regresi yang berbeda mengindikasikan bahwa tipe konsentrasi kepemilikan tidak mempengaruhi pengungkapan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan di Indonesia yang cenderung merupakan perusahaan keluarga, di mana normal untuk menjumpai grup perusahaan keluarga yang berada dalam bisnis yang bervariasi dan eksekutif perusahaan (komisaris dan direksi) dipegang oleh anggota keluarga tersebut, mengingat eksekutif perusahaan dipilih oleh pemegang saham (yang adalah keluarga) lewat Rapat Umum Pemegang Saham (Dominique, 2015; Faculty of Commerce & Economics, Amran University, Yemen & Mgamal, 2017). Keadaan ini yang menjadikan pengungkapan *integrated report* dianggap belum terlalu penting bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena informasi kepemilikan saham yang wajib dipublikasikan adalah kepemilikan saham di atas 5% dan kepemilikan oleh eksekutif perusahaan. Perusahaan tidak wajib mengungkapkan kepemilikan di bawah nilai tersebut karena dianggap tidak material, kecuali untuk kepemilikan Direksi dan Komisaris karena menunjukkan kontrol akan perusahaan (Dominique, 2015). Jadi dapat dikatakan bahwa pihak dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dapat mengakses informasi yang diperlukan secara langsung ke perusahaan tanpa melalui laporan keuangan dan laporan tahunan.

Perusahaan di Indonesia juga tidak diwajibkan untuk mengungkapkan siapa *ultimate owner* perusahaan, sehingga publik tidak dapat mengetahui siapa yang berada pada puncak piramida kepemilikan tersebut (Dominique, 2015). Pengungkapan akan informasi ini tidak diwajibkan dilakukan pada setiap laporan tahunan perusahaan. Padahal pengungkapan tersebut mungkin dapat mempengaruhi keputusan *stakeholder*, khususnya investor karena menunjukkan penguasaan kontrol yang sesungguhnya akan perusahaan. Ketidakajiban pengungkapan ini dapat menyebabkan tidak transparannya informasi yang mungkin juga menimbulkan masalah lain, misalnya adanya transaksi antara dua pihak yang karena tidak diungkapkannya informasi ini, tidak dapat diketahui sebagai *related party transactions*. Padahal, transaksi tersebut terjadi antara dua pihak yang berelasi dan bukan diperlakukan sebagai *arm-length transaction*.

Alasan lain yang dapat digunakan mengapa pemegang saham mayoritas tidak terlalu tertarik terhadap pengungkapan informasi pada pelaporan *integrated report* adalah sebagai strategi dalam persaingan, beberapa informasi penting sengaja ditahan oleh manajemen dan atau pemegang saham mayoritas untuk menghindari dimanfaatkannya informasi tersebut oleh para pesaing perusahaan (Forssbaeck & Oxelheim, 2015). Riset yang dilakukan (Stubbs & Higgins, 2014) menyatakan bahwa

para pemilik dengan kepemilikan mayoritas harusnya mendiskusikan penerapan *integrated report* dengan para CFO (*Chief Financial Officer*). Hal tersebut dilakukan karena kebanyakan perusahaan memiliki perikatan yang lemah dengan pihak-pihak keuangan perusahaan berkaitan dengan penerapan *integrated reporting*, terlihat dengan kurangnya partisipasi pihak keuangan dalam penelitian mengenai *integrated reporting* (Darus et al., 2013; Stubbs & Higgins, 2014).

Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan *Integrated Report*

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai $t = -1.108304$ dan $p = 0.2711$ ($p > 0.05$). Hasil pengujian menunjukkan tingkat *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan *integrated report* emiten, dengan demikian, hipotesisnya ditolak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andrikopoulos & Krikilani, 2012) yang menyatakan adanya hubungan antara *leverage* dengan pengungkapan *sustainability report* perusahaan.

Salah satu faktor, yang menurut peneliti, menyebabkan terjadi hasil penelitian yang berbeda ini adalah ketidakpedulian para kreditor terhadap isu-isu yang berkembang seperti isu keberlanjutan, yang terdapat dalam *integrated report*. Aspek-aspek ini tidak didukung dalam teori agensi, di mana dalam teori ini memfokuskan hanya kepada agen dan prinsipal saja. Alasan lain diungkapkan oleh (Kuzey & Uyar, 2017) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi dibatasi oleh sumber keuangan perusahaan sehingga perusahaan berkemungkinan lebih fokus terhadap tujuan jangka pendek (*short-term goals*) dibandingkan tujuan jangka panjang (*long-term goals*). Hal inilah yang menjadikan perusahaan menganggap *sustainability reporting* sebagai suatu "luxury" (kemewahan), dibandingkan sebagai *a long-term value-generating practice* (Kuzey & Uyar, 2017).

Pengaruh Kompensasi Karyawan Terhadap Pengungkapan *Integrated Report*

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan nilai $t = 3.1864811$ dan $p = 0.0021$ ($p < 0.05$). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa kompensasi karyawan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *integrated report* diterima. Hal ini berarti bahwa semakin besar kompensasi yang diterima oleh karyawan perusahaan, maka semakin meningkatkan pengungkapan *integrated report* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ogbonnaya et al., 2017)) yang menyatakan bahwa kepuasan karyawan terhadap perusahaan akan memotivasi perusahaan mengungkapkan informasi mengenai sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, di mana *human capital* ini termasuk dalam aspek *integrated report*.

Kepuasan karyawan dan *employee engagement* memiliki hubungan yang erat (Ogbonnaya et al., 2017). Menurut (Kruse, 2012), apabila perusahaan telah memiliki *employee engagement* yang baik, yaitu keadaan dimana seorang karyawan secara emosional berkomitmen terhadap perusahaan dan tujuannya. Keterikatan karyawan muncul karena mereka peduli dan bukan hanya karena mereka harus melakukan atau untuk mendapatkan kompensasi ataupun untuk mendapatkan promosi. *Employee engagement* memiliki suatu kekuatan yang dapat memberikan motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pengungkapan mengenai *employee engagement* sendiri telah menjadi fokus perusahaan guna meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Dalam *capital stewardship* <IR>, aspek mengenai modal manusia (*human capital*) dan kelima modal lainnya (*intellectual capital, natural capital, financial capital, manufactured capital, dan social and relationship capital*) penting untuk diungkapkan secara transparan demi membangun kepercayaan publik (Krzus, 2011).

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Integrated Report*

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai $t = 1.949845$ dan $p = 0.0547$ ($p > 0.05$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, yang artinya semakin banyak anggota komisaris independen ternyata tidak menentukan meningkatnya pengungkapan <IR> dalam laporan perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Rudyanto, 2016) yang menunjukkan adanya pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap kualitas

pengungkapan *sustainability report*. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (García-Sánchez et al., 2013; Hamad et al., 2020) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan perusahaan

Dewan komisaris independen memiliki perhatian yang besar terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar sesuai dengan aturan dan memenuhi tujuan perusahaan itu sendiri (Rodríguez-Ariza et al., 2012; Zeng, 2010). Namun keberadaan <IR> yang relatif masih baru memiliki kemungkinan belum diperhatikan dalam perusahaan. Hal ini dapat terlihat bahwa pengungkapan *sustainability report* di Indonesia pun masih menjadi pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*) belum menjadi pengungkapan wajib (*mandatory*). Hal berbeda ini dapat juga disebabkan oleh kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikannya secara keseluruhan.

Hal lain yang dapat mungkin menyebabkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh atas pengungkapan <IR> adalah tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya dorongan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan sosial. Peningkatan kualitas dan kuantitas informasi yang akan diungkapkan, di mana akan secara langsung mempengaruhi pengalaman dan reputasi dewan independen tersebut (Fama & Jensen, 1983). Oleh karena itu, tindakan dewan komisaris independen akan mempengaruhi keputusan perusahaan, maka dewan komisaris independen seharusnya lebih cepat menerima kebutuhan akan informasi baru, seperti yang terdapat dalam *integrated report* (Rodríguez-Ariza et al., 2012).

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Integrated Report*

Isu mengenai keberlanjutan (*sustainability*), yang juga merupakan aspek yang ada dalam *integrated report*, saat ini makin meluas dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Hal ini mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan produk perusahaan (baik barang maupun jasa) yang perusahaan tawarkan. Konsumen, *suppliers*, karyawan, dan investor yang merupakan *primary stakeholder* perusahaan memiliki pertimbangan ketika akan bekerja sama dengan suatu perusahaan, salah satunya mengenai pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan.

Integrated report merupakan bagian dari komunikasi antara para *stakeholder* dengan perusahaan, di mana laporan dibuat guna menciptakan transparansi bagi para *stakeholder* (International Integrated Reporting Council (IIRC), 2013). Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* terhadap manajemen, di mana terkadang terdapat perbedaan antar *stakeholder* dan perusahaan. Keberadaan komite audit yang bersifat independen diharapkan dapat menjamin transparansi laporan perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ahmed Haji & Anifowose, 2016a; Gantowati & Nugraheni, 2014) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara frekuensi pertemuan dewan komite audit dengan pengungkapan informasi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *integrated report*. Hal ini berdasarkan hasil uji statistik di mana didapatkan nilai $t = 0.350325$ dan $p = 0.7270$ ($p > 0.05$) maka hipotesis ditolak dalam penelitian ini. Perbedaan hasil ini terjadi dimungkinkan karena komite audit, dalam menjalankan fungsinya, bekerjasama dengan satuan pengawasan internal perusahaan. Hal ini memungkinkan adanya rapat yang tidak efektif, di mana suatu masalah yang dibahas dalam rapat komite audit sebenarnya mungkin bisa atau bahkan telah ditangani oleh pengawas internal perusahaan.

Kemungkinan lain yang menyebabkan rapat menjadi kurang efektif, adalah adanya dualitas fungsi dalam anggota komite audit. Dominasi suara dari anggota komite audit yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan juga dapat menyebabkan terjadi ketidakefektifan dalam rapat komite audit (Al-Najjar, 2012).

Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap Pengungkapan *Integrated Report*

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan nilai $t = 1.240438$ dan $p = 0.2184$ ($p > 0.05$) maka hipotesisnya ditolak. Hasil temuan empiris dalam penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keterwakilan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *integrated report* perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Ben-Amar et al., 2015; Fernandez-feijoo et al., 2014) yang menemukan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif pada transparansi pengungkapan perusahaan, terutama isu *sustainability*, yang juga merupakan aspek dalam *integrated report*. Keberadaan atau keterwakilan wanita dalam perusahaan menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang (tidak diskriminasi), memiliki pemahaman yang luas mengenai pasar dan konsumen, sehingga dapat meningkatkan reputasi (legitimasi) perusahaan.

Pada kenyataannya yang terjadi, khususnya dengan melihat hasil penelitian ini, wanita mengalami kesulitan ketika masuk ke dunia bisnis. Faktor lingkungan dan faktor budaya merupakan faktor yang lebih sulit dibandingkan faktor dari individu (wanita itu sendiri) dalam menentukan seberapa yakin wanita dalam mencapai manajemen puncak (Devillard et al., 2014). Ketika wanita telah berada dalam bisnis pun, kemampuan mereka masih diragukan. Survei yang dilakukan oleh (McKinsey & Company, 2013) menyatakan bahwa responden, eksekutif pria, tidak begitu yakin wanita dapat memimpin seefektif pria.

Dalam teori feminisme liberal sendiri telah ditekankan kesejajaran antara pria dan wanita dalam mengembangkan diri, hal ini berkaitan dengan *women empowerment* yang diserukan para feminisme (Whippman, 2016). *Women empowerment* menjadikan wanita memiliki keyakinan bahwa keberadaan mereka dan keputusan yang mereka tidak dipandang sebelah mata dan disejajarkan dengan pria. Sebagian negara telah menerapkan sistem kuota *gender* (*gender quotas*) dalam organisasi bisnisnya untuk mengurangi masalah kesenjangan ini.

Norwegia adalah negara pertama yang mengadopsi kuota untuk anggota dewan perempuan (40%) pada tahun 2004. Negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, Belgia, Islandia dan Italia mewajibkan sistem kuota ini atau secara sukarela mengikuti sistem ini seperti yang dilakukan negara Austria, Finlandia, Belanda, Spanyol, Swedia dan Inggris. Berlakunya sistem kuota ini agar terciptanya kesetaraan dan mengurangi diskriminasi *gender* dalam bisnis (Wiersema & Mors, 2016). Sehingga diharapkan di Indonesia dapat memberlakukan sistem kuota dalam organisasi bisnisnya seperti negara-negara tersebut. Bukan hanya terkait dengan mengurangi diskriminasi, perusahaan dengan keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi menunjukkan sifat kehati-hatian yang lebih, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen untuk menjadi perusahaan yang baik dan mematuhi norma serta nilai sosial (Luckerath-Rovers, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai analisis pengaruh *stakeholder engagement* dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *integrated report* perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2017-2019, maka diperoleh hasil empiris di mana konsentrasi kepemilikan, leverage, proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat komite audit dan *gender diversity* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *integrated report*. Hubungan signifikan positif dengan pengungkapan <IR> adalah variabel kompensasi karyawan. *Integrated report* dirancang dengan dasar adanya kepentingan para *stakeholder* yang harus diperhatikan dan dikomunikasikan secara transparan (International Integrated Reporting Council (IIRC), 2013). Hubungan yang erat antara para *stakeholder* dan perusahaan akan menciptakan *stakeholder engagement* yang merupakan faktor kesuksesan penerapan <IR> (EY, 2017). Hasil penelitian ini belum menunjukkan bahwa para *stakeholder* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan, dan pihak dalam perusahaan, seperti dewan direksi dan komisaris maupun komite-komite di dalamnya (yang

merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*) belum memiliki andil terhadap luasnya pengungkapan <IR> yang dilakukan oleh perusahaan.

SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan <IR> di Indonesia masih terbelang isu yang baru. Oleh sebab itu, perusahaan masih belum memberikan perhatian lebih kepada bentuk pelaporan baru ini. Bukan hanya itu, <IR> bahkan *sustainability report* sendiri masih bersifat *voluntary* di Indonesia, maka dari itu perusahaan merasa tidak perlu mempublikasi laporannya sesuai dengan standar <IR> ataupun *sustainability report*. Namun di beberapa perusahaan sampel, komponen yang ada dalam <IR> telah diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menutup kemungkinan menggunakan <IR> secara penuh di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- (ACCA), A. of C. C. A. (2015). *Improving Stakeholder Engagement Reporting*. <http://www.accaglobal.com>
- Adams, C. A., Potter, B., Singh, P. J., & York, J. (2016). Exploring the implications of integrated reporting for social investment (disclosures). *The British Accounting Review*, 48(3), 283–296. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.05.002>
- Ahmed Haji, A., & Anifowose, M. (2016a). Audit Committee and Integrated Reporting Practice: Does Internal Assurance Matter? *Managerial Auditing Journal*, 31(8/9), 915–948. <http://dx.doi.org/10.1108/MAJ-12-2015-1293>
- Ahmed Haji, A., & Anifowose, M. (2016b). Audit committee and integrated reporting practice: Does internal assurance matter? *Managerial Auditing Journal*, 31(8/9), 915–948. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2015-1293>
- Al-Najjar, B. (2012). The determinants of board meetings: Evidence from categorical analysis. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 178–190. <https://doi.org/10.1108/09675421211254867>
- Andrikopoulos, A., & Krikilani, N. (2012). Environmental Disclosure and Financial Characteristics of the Firm: The Case of Denmark. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(1), 55–64. <https://doi.org/10.1002/csr.1281>
- Ben-Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. (2015). Board Gender Diversity and Corporate Response to Sustainability Initiatives: Evidence from the Carbon Disclosure Project. *Journal of Business Ethics*, 65(4), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2759-1>
- Bernardi, C., & Stark, A. W. (2018). Environmental, social and governance disclosure, integrated reporting, and the accuracy of analyst forecasts. *The British Accounting Review*, 50(1), 16–31. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.10.001>
- Boulouta, I. (2013). Hidden Connections: The Link Between Board Gender Diversity and Corporate Social Performance. *Journal of Business Ethics*, 113(2), 185–197. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1293-7>
- Cheng, M., Green, W., Conradie, P., & Romi, A. (2014). The international integrated reporting framework: Key issues and future research opportunities. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 25(1), 90–119. <https://doi.org/10.1111/jifm.12015>
- Darus, F., Hamzah, E. A. C. K., & Yusoff, H. (2013). CSR Web Reporting: The Influence of Ownership Structure and Mimetic Isomorphism. *Procedia Economics and Finance*, 7(2013), 236–242. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00240-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00240-2)
- Deegan, C. (2010). *Financial Accounting Theory* (3rd ed). McGraw-Hill.
- Delis, M. D., Gaganis, C., Hasan, I., & Pasiouras, F. (2016). The Effect of Board Directors from Countries with The Effect of Board Directors from Countries with Different Genetic Diversity Levels on Corporate Performance. *Management Science*, 63(1), 1–19. <http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2015.2299>
- Deloitte. (2014). *Stakeholder Engagement*. Stakeholder Engagement. <http://www.deloitte.com>
- Deloitte. (2015). *The Deloitte Millennial Survey 2015*.

- Devillard, S., Sancier-Sultan, S., & Werner, C. (2014). *Why gender diversity at the top remains a challenge*. <http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-gender-diversity-at-the-top-remains-a-challenge>
- Dominique, L. L. I. (2015). *Praktik Good Corporate Governance Terkait Struktur Kepemilikan Perusahaan di Indonesia*.
- Dragu, I.-M., & Tiron-tudor, A. (2013). The Integrated Reporting Initiative from an Institutional Perspective: Emergent Factors. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 92(Lumen), 275–279. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.672>
- EY. (2017). *Six growing trends in corporate sustainability*. <http://www.ey.com/US/en/Services/Specialty-Services/Climate-Change-and-Sustainability-Services/Six-growing-trends-in-corporate-sustainability-overview>
- Faculty of Commerce & Economics, Amran University, Yemen, & Mgammal, M. H. (2017). The Effect of Ownership Structure on Voluntary Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Advanced Management Science*, 5(2), 138–151. <https://doi.org/10.18178/joams.5.2.138-151>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). SEPARATION OF OWNERSHIP AND CONTROL *. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1016/0141-218.001.105>
- Fernandez-Feijoo, B., Romero, S., & Ruiz, S. (2012). Does Board Gender Composition affect Corporate Social Responsibility Reporting? *International Journal of Business and Social Science*, 3(1), 31–52.
- Fernandez-feijoo, B., Romero, S., & Ruiz-blanco, S. (2014). Women on Boards: Do They Affect Sustainability Reporting? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 21(6), 351–364. <https://doi.org/10.1002/csr.1329>
- Forssbaeck, J., & Oxelheim, L. (2015). *The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency*. Oxford University Press.
- Freeman, R. E. (1984). Stakeholder Theory of The Modern Corporation. *Journal of Management Studies*, 39(1), 1–21.
- Frias-Aceituno, J. V., Rodriguez-Ariza, L., & Garcia-Sanchez, I. M. (2013). The role of the board in the dissemination of integrated corporate social reporting. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(4), 219–233. <https://doi.org/10.1002/csr.1294>
- Gantjowati, E., & Nugraheni, R. L. (2014). The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms (Case Study of Non-financial Firms in Indonesia Over the Period of 2009-2011). *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 10(4), 1548–6583.
- García-Sánchez, I. M., Frías-Aceituno, V. J., & Rodríguez-Domínguez, L. (2013). Determinants of corporate social disclosure in Spanish local governments. *Journal of Cleaner Production*, 39(1), 60–72.
- Godos-Díez, J.-L., Fernández-gago, R., Cabeza-García, L., & Martínez-Campillo, A. (2014). Determinants of CSR practices: Analysis of the influence of ownership and the management profile mediating effect. *Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad*, 43(1), 47–68. <https://doi.org/10.1080/02102412.2014.890824>
- Hamad, S., Draz, M. U., & Lai, F.-W. (2020). The Impact of Corporate Governance and Sustainability Reporting on Integrated Reporting: A Conceptual Framework. *SAGE Open*, 10(2), 215824402092743. <https://doi.org/10.1177/2158244020927431>
- Horngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2012). *Financial & Managerial Accounting* (3rd Editio). Prentice Hall.
- Humm, M. (1992). Women ' s Studies at the University of East London. *Women's Studies Quarterly*, 20(3/4), 38–43.
- International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). *The International < IR > Framework*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- Jonikas, D. (2014). Value created through CSR measurement possibilities. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 156(4), 189–193. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.169>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Kokemuller, N. (2017). *How Formal Stakeholders Impact the Business Continuity Plan*. <http://smallbusiness.chron.com/formal-stakeholders-impact-business-continuity-plan-66052.html>
- Kruse, K. (2012). *Employee Engagement 2.0: How to Motivate Your Team for High Performance—A Real-World Guide for Busy Managers* (2nd Editio). CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Krzus, M. P. (2011). Integrated reporting: If not now , when ? *Zeitschrift Fuer Internationale Rechnungslegung*, 6(6), 271–276.
- Kumar, P., & Zattoni, A. (2016). Editorial Corporate Governance , Board Gender Diversity and Firm Performance. *Corporate Governance: An International Review*, 24(4), 388–389. <https://doi.org/10.1111/corg.12172>
- Kusmalinda, T. (2015). *Pengaruh Employee Engagement Terhadap Produktivitas Perusahaan*. http://www.kompasiana.com/kusmallindatriasih.com/pengaruh-employee-engagement-terhadap-produktivitas-perusahaan_54f95f2_ea33311f4018b4cc2
- Kuzey, C., & Uyar, A. (2017). Determinants of sustainability reporting and its impact on firm value: Evidence from the emerging market of Turkey. *Journal of Cleaner Production*, 143, 27–39. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.153>
- Li, J., Mangena, M., & Pike, R. (2012). The effect of audit committee characteristics on intellectual capital disclosure. *The British Accounting Review*, 44(2), 98–110. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.003>
- Lourenço, I. C., & Castelo, M. (2013). Determinants of corporate sustainability performance in emerging markets: The Brazilian case. *Journal of Cleaner Production*, 57(2), 134–141. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.013>
- Luckerath-Rovers, M. (2013). Women on boards and firm performance . *Journal of Management & Governance*, 17(2), 491–509. <https://doi.org/10.1007/s10997-011-9186-1>
- McKinsey & Company. (2013). *McKinsey Global Survey of 1,421 Global Executives on Gender Diversity*.
- Ogbonnaya, C., Daniels, K., Anglia, E., & Nielsen, K. (2017). Does contingent pay encourage positive employee attitudes and intensify work? *Human Resource Management Journal*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12130>
- (PwC), P. (2013). *Point of View Integrated Reporting-Going Beyond The Financial Results*. <http://www.pwc.com>
- Rensburg, R., & Botha, E. (2014). Is Integrated Reporting the silver bullet of financial communication? A stakeholder perspective from South Africa. *Public Relations Review*, 40(2), 144–152. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.11.016>
- Rodríguez-Ariza, L., García-Sánchez, I.-M., & Frías-Aceituno, J.-V. (2012). THE ROLE OF THE BOARD IN ACHIEVING INTEGRATED FINANCIAL AND SUSTAINABILITY REPORTING. *XV Encontro AECA, Ofir-Esposende (Portugal)*, 1–22.
- Sirakaya-turk, E., Baloglu, S., & Mercado, H. U. (2015). The Efficacy of Sustainability Values in Predicting Travelers ' Choices for Sustainable Hospitality Businesses. *Cornell Hospitality Quarterly*, 55(1), 115–126. <https://doi.org/10.1177/1938965513499822>
- Siregar, S. V., & Rudyanto, A. (2016). The Effect of Stakeholder Pressure and Corporate Governance on the Quality of Sustainability Report. *International Conference on Accounting Studies (ICAS), August*, 184–189.
- Speziale, M.-T., & Klovienè, L. (2014). The Relationship between Performance Measurement and Sustainability Reporting: A Literature Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 156(April), 633–638. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.254>

- Stubbs, W., & Higgins, C. (2014). Integrated Reporting and internal mechanisms of change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(7), 1068–1089. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1279>
- Suryono, H., & Prastiwi, A. (2011). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance (CG) Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (SR) (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009). *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 21–22.
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Routledge.
- Upadhyay, A., & Zeng, H. (2014). Gender and ethnic diversity on boards and corporate information environment. *Journal of Business Research*, 67(11), 2456–2463. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.03.005>
- Uyar, A., Kilic, M., & Bayyurt, N. (2013). Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from Turkish listed companies. *Intangible Capital*, 9(4), 1080–1112. <http://dx.doi.org/10.3926/ic.439>
- Valasquez, L. (2014). *Employee Engagement vs Satisfaction vs Motivation*. <https://www.linkedin.com/pulse/20140625224424-19395817-employee-engagement-vs-satisfaction-vs-motivation>
- Whippman, R. (2016). *“Empowerment” Is Warping Women’s View of Real Power*. <http://time.com/4385943/empowerment-power/>
- Wiersema, M., & Mors, M. L. (2016). *What Board Directors Really Think of Gender Quotas*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2016/11/what-board-directors-really-think-of-gender-quotas>
- World Bank. (2014). *Gender at work: A Companion to the World Development Report on Jobs*.
- Zeng, T. (2010). Ownership Concentration, State Ownership, and Effective Tax Rates: Evidence from China’s Listed Firms*: OWNERSHIP CONCENTRATION, STATE OWNERSHIP, AND EFFECTIVE TAX RATES. *Accounting Perspectives*, 9(4), 271–289. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3838.2010.00014.x>
- Zhuravka, F., Kravchenko, O., Ovcharova, N., Oleksich, Z., & Miroshnychenko, O. (2020). Impact of integrated reporting on enterprise value-based management: Evidence from Ukraine. *Problems and Perspectives in Management*, 18(2), 154–165. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(2\).2020.14](https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.14)